



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARWAN**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR I**
3. NHK : **514157**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.504.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 496 m2/256 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah Seluas 451 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. Tanah Seluas 7025 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 977 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 115.000.000
5. Tanah Seluas 2892 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
7. Tanah Seluas 119 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
8. Tanah Seluas 159 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
9. Tanah Seluas 119 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
10. Tanah Seluas 399 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 199.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 505.500.000**



1. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
365.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
5.500.000
3. MOBIL, HONDA HONDA JAZZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	335.382.819
F. HARTA LAINNYA	Rp.	671.765.351
Sub Total	Rp.	4.017.148.170
III. HUTANG	Rp.	243.505.800
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.773.642.370

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.